

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN JAMINANA KESEHATAN NASIONAL (BPJS KESEHATAN)

Aisyah Fadila *¹

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : aisyahfadila34@gmail.com

Makhfiratun Nur Marbun

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : firamarbun3@gmail.com

Abdillah Syaputra Siregar

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Fitriani Pramita Gurning

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Keywords

JKN;
BPJS;
Health ;
Dues;
Factor

Abstract

Background: Health Social Security Administering Body (BPJS Kesehatan) is a social health insurance service company appointed by the Government to provide health insurance coverage for JKN participants. Many participants do not routinely pay contributions every month, while participant compliance in paying contributions every month will be one of the factors that determines the sustainability of the JKN program. This condition still persists to this day. Research objective: The aim is to find out what factors influence compliance with paying contributions for national health insurance or BPJS Kesehatan. Research Methods: The method used in this research is descriptive quantitative. The research instrument was through a questionnaire and using simple random sampling. Results & Discussion As many as 67.5% of the public has understood the benefits of JKN itself. As many as 69.4% of the public stated that BPJS contributions were affordable and in accordance with the income of each person.

¹ Coresponding author

And 69.4% also stated that the services provided were adequate. Conclusion: Based on the results of the research conducted, the conclusion that can be drawn is that the community factor delays paying BPJS contributions due to several factors including not having enough money, so that people often prioritize the need to pay other than BPJS contributions. Then the community does not know about the JKN payment procedure.

Kata kunci

Abstrak

JKN

BPJS

Kesehatan

iuran;

Faktor

Latar belakang : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan perusahaan jasa asuransi kesehatan social yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Peserta banyak yang tidak rutin membayar iuran setiap bulannya sedangkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran setiap bulannya akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program JKN ini. Kondisi inipun masih berlangsung sampaisaat ini. Tujuan penelitian : Tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran jaminan kesehatan nasional atau bpjs kesehatan Metode Penelitian : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Instrumen penelitian ini melalui kuesioner dan menggunakan simple random sampling. Hasil & Pembahasan Sebanyak 67,5 % masyarakat telah memahami manfaat dari JKN itu sendiri. Sebanyak 69,4 % masyarakat menyatakan bahwa iuran BPJS sudah terjangkau dan sesuai dengan pendapatan dari masing-masing orang. Dan 69,4 % juga menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup memadai. Kesimpulan : Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu faktor masyarakat menunda pembayaran iuran BPJS disebabkan karena beberapa faktor di antaranya tidak mempunyai cukup uang , sehingga masyarakat sering kali mendahulukan keperluan membayar yang lain dari pada iuran BPJS. Kemudian masyarakat kurang mengetahui prosedur pembayaran dari JKN tersebut.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai landasan terbentuknya perlindungan sosial untuk menjadi agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidup yang layak, menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mulai 01 Januari 2014 Pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk rakyat Indonesia dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di bidang Kesehatan untuk mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini ditujukan untuk mencapai Indonesia yang lebih sehat.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan perusahaan jasa asuransi kesehatan sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Dimana sampai dengan bulan April 2023 jumlah peserta yang terdaftar menjadi peserta program JKN adalah sekitar 254.145.225 jiwa. Untuk melayani pesertanya di seluruh Indonesia BPJS kesehatan mempunyai 13 (tiga belas) Kantor Deputi Wilayah, 127 Kantor Cabang, dan 391 Kantor Kabupaten/Kota. Untuk wilayah kota medan sendiri, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan Sari Quratulainy, mengatakan peserta JKN-KIS Kota Medan saat ini berjumlah 2.016.735 jiwa atau 79,89% dari jumlah penduduk. Dari jumlah peserta tersebut, segmen PBPJ atau mandiri masih banyak yang menunggak. "Dari 301.365 jiwa yang menunggak iuran, sebanyak 201.002 jiwa di antaranya berasal dari peserta kelas 3. Kemudian 50.507 jiwa dari kelas 2, dan 49.856 jiwa dari kelas 1,".

Keberlangsungan hidup suatu program kegiatan salah satunya berasal dari ketersediaan dana untuk kegiatan operasional dan non operasionalnya, begitu juga untuk program jaminan kesehatan ini dimana penerimaan iuran yang berkesinambungan merupakan backbone untuk ke berlangsung program Jaminan. Dari berbagai segmen peserta yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sejak awal tahun 2014, tingkat kolektibilitas iuran yang paling rendah memang berasal dari segmen PBPJ atau peserta mandiri. Tingkat kolektibilitas iuran yang masih rendah berada pada segmen peserta bukan penerima upah (PBPJ) atau yang lebih dikenal dengan peserta mandiri/individu. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar peserta mendaftarkan dirinya atau keluarganya disaat mereka sakit dan setelah sembuh mereka tidak lagi melakukan pembayaran. Peserta banyak yang tidak rutin membayar iuran setiap bulannya sedangkan kepatuhan peserta dalam membayar iuran setiap bulannya akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan program JKN ini. Kondisi inipun masih berlangsung sampaisaat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran jaminan kesehatan nasional atau bpjs kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang dipelajari apa adanya, dan menarik

kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Instrumen penelitian ini melalui kuesioner dan menggunakan simple random sampling.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran jaminan kesehatan. Sebanyak 67,5 % masyarakat telah memahami manfaat dari JKN itu sendiri. Jaminan kesehatan dapat mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan yang dikeluarkan dari kantong sendiri (OOP), dimana biaya yang harus dikeluarkan sulit untuk di prediksi dan seringkali memerlukan biaya yang cukup besar (Ingan Tarigan (2017). Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi;

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama
2. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
3. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
4. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan

Dan masyarakat sendiri mempercayai bahwa jkn sendiri memberikan perlindungan kesehatan yang memadai. Sebanyak 69,4 % masyarakat menyatakan bahwa iuran BPJS sudah terjangkau dan sesuai dengan pendapatan dari masing-masing orang. Dan 69,4 % juga menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup memadai. Mengenai informasi yang jelas dan akurat terkait jaminan kesehatan nasional sendiri sebanyak 38,8 % masih kurang mendapatkan informasi, hanya 14,3 % yang jelas mendapatkan informasi yang akurat terhadap informasi jkn. Untuk pembayaran BPJS sendiri 85,7 % tidak merasa kesulitan dalam pembayaran dan 14,3 % merasa kesulitan dengan beberapa alasan tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar iuran tersebut selain itu masyarakat kurang mengetahui proses membayar iuran tersebut. Hampir 70 % masyarakat mengatakan bahwa untuk mengakses pembayaran iuran JKN mudah, 18,4 % mengatakan sangat mudah, dan kurang dari 13 % masyarakat mengatakan sulit untuk mengakses pembayaran iuran JKN. Pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran JKN sudah cukup sebanyak 65,3% mengetahui mengenai prosedur pembayaran iuran. Dan sebanyak 38,8 % merasa cukup terbebani terhadap besarnya nominal dan 44,9 % tidak terbebani.

Faktor yang Mempengaruhi Keteraturan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lainnya terdiri dari : Pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Pendidikan seseorang merupakan salah satu proses perubahan tingkah laku. Pendidikan didefinisikan sebagai tingkat pendidikan formal tertinggi yang dicapai dan ditunjukkan dengan bukti ijazah. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, pendidikan digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu pendidikan rendah (meliputi : tidak sekolah, tamat SD/MI/MTS), pendidikan menengah (meliputi: tamat SMA/MA/SMK/MAK), pendidikan tinggi (meliputi: tamat Diploma/Sarjana/Magister/Spesialis).

Menurut Handayani, dkk (2013: 7) pendidikan mempengaruhi persepsi risiko, derajat kegunaganaan menerima risiko dan persepsi terhadap besarnya kerugian. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin bertambah pengetahuan mengenai informasi jaminan kesehatan dan kebutuhannya terhadap pelayanan kesehatan. Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka dapat lebih memahami dan mengetahui manfaat serta kebutuhan yang dianggap penting seperti kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang dapat dijamin dengan cara membayar iuran jaminan kesehatan sehingga tingkat keinginan seseorang dalam membayar iuran tersebut akan semakin meningkat, dan sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat menurunkan keinginannya dalam membayar iuran jaminan kesehatan karena tingkat pemahaman serta pengetahuan mengenai adanya iuran jaminan kesehatan masih rendah.

Menurut Notoatmodjo (2010: 207), pekerjaan adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memperoleh penghasilan. Peserta asuransi kesehatan yang memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan memiliki hubungan dengan keteraturan peserta dalam membayar iuran dana sehat. Peserta yang teratur dalam membayar iuran dana sehat ketika peserta memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk membayar iuran dana sehat sebaliknya pada peserta yang tidak memiliki pekerjaan akan menurunkan keteraturannya dalam membayar iuran dana sehat karena tidak memiliki pendapatan yang dialokasikan untuk membayariuran dana sehat tersebut (Kertayasa, 2010).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktifitas masyarakat setiap bulannya sesuai standar upah minimum pendapatan perkapita daerah. Menurut Sakinah, dkk (2014) bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berasuransi dan membayar iuran. Begitu pula dengan pengaruh pendapatan dengan keteraturan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendapatan seseorang memegang peranan penting tingginya kesadaran seseorang terhadap keteraturan dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendapatan yang rendah mampu menurunkan keteraturan masyarakat dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga sehingga tidak ada alokasi pendapatan yang digunakan peserta untuk membayar iuran tersebut. Lain halnya dengan yang berpendapatan

tinggi dan mempunyai tingkat kesejahteraan menengah keatas memiliki tingkat keteraturan yang tinggi dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan, 2014).

Mengenai penundaan pembayaran iuran JKN sebagian besar masyarakat menunda pembayaran dikarenakan keuangan yang belum memadai dan pada saat jatuh tempo banyak pengeluaran yang dikeluarkan sehingga tidak cukup uang untuk membayar iurannya. Sebanyak 53,1% masyarakat merasa bahwa pemerintah sudah cukup untuk memberikan dorongan kepada masyarakat untuk kepatuhan pembayaran iuran. Dan sebagian lagi 34,7 % merasa kurang cukup inisiatif dalam memberi dorongan kepatuhan membayar iuran jkn.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu faktor masyarakat menunda pembayaran iuran BPJS disebabkan karena beberapa faktor di antaranya tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, akan tetapi dari hasil penelitian yang didapatkan faktor utama yang menjadi pemicu masyarakat menunda pembayaran iuran adalah faktor kurangnya pendapatan (uang), sehingga masyarakat sering kali mendahulukan keperluan membayar yang lain dari pada iuran BPJS. Kemudian masyarakat kurang mengetahui prosedur pembayaran dari JKN tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Makassar, 2008. Pedoman Pendataan Survei Penduduk Antar Sensus 2017.
- Badan Pusat Statistik Makassar, 2017. Pedoman Pendataan Survei Penduduk Antar Sensus 2017.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2010. Pedoman Pendataan Survei Penduduk Antar Sensus 2010.
- BPJS Kesehatan. 2017. Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sulawesi Selatan: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS, 2014.
- Cahyono, M. R. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Bagi Peserta Informal Di Kota Makassar, (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR)
- Rumikawati, S. (2020). Studi Eksplorasi Faktor-Faktor Penyebab Pelunasan Tunggakan Iuran Peserta JKN Kabupaten Gresik (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).